Pembagian Waris Anak di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/PDT/2015

Radila Halimah Harliani, Husni Syawali

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

radilaharliani@gmail.com

Abstract—The inheritance law is the rule that governs the switching of rights and obligations of the heir to the heir, in the case of the law of the inheritance there is still a division of inheritance that is not in accordance with the provisions of the law in Indonesia, one of the heirs of Essentially the inheritance of the child outside the marriage does not always go smoothly, there are many cases of inheritance experienced by the family of blood with the child out of marriage, because the foreign child has not received recognition in the eyes of the law. Sdo cases of family inheritance Ida Nyoman Rai in Mataram, where 3 children outside marriage in the defendant by the blood relatives because of the uncommitted recognition by the customary law of Bali. This Research aims to determine the implementation of provisions and implementation of the child's inheritance outside of marriage based on the positive law in Indonesia. This Method of study uses a normative juridical approach with the analyst's DescriptiveResearch specification. Data collection Techniques are library studies and methods of analysis using qualitative juridical. The results of this research are the defendant or the child out of marriage entitled to get inheritance because the heir has already divided Boedel heirs fairly and legitimately.

Keywords—*Inheritance division, Child foreign marriage, Positive Law in Indonesia*

Abstrak—Hukum waris merupakan aturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, dalam permasalahan hukum waris masih terdapat pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, salah satunya pembagian waris anak di luar kawin. Pada dasarnya pembagian waris anak di luar kawin tidak selalu berjalan lancar, banyak terjadi kasus pewarisan yang dialami oleh keluarga sedarah dengan anak luar kawin, karena anak luar kawin belum mendapatkan pengakuan di mata hukum. Seperti kasus pewarisan keluarga Ida Nyoman Rai di Mataram, dimana 3 anak di luar kawin di gugat oleh saudara sedarah karena belum dilakukan pengakuan oleh hukum adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan dan pelaksanaan pembagian waris anak di luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data adalah

studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini ialah para tergugat atau anak luar kawin berhak mendapatkan warisan karena pewaris sudah membagi boedel waris secara adil dan sah.

Kata Kunci—*Pembagian Waris, Anak Luar Kawin, Hukum Positif Di Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Hukum Waris di Indonesia pada saat ini sangat pluralistik atau beraneka ragam. Di wilayah Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Seperti yang telah diuraikan, hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing.

Menurut Soepomo yang merupakan salah satu ahli hukum, beliau menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 unsur pokok yakni : adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Sistem hukum waris di Indonesia meliputi :

1. Hukum Waris Islam
2. Hukum Waris Adat
3. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Hukum Waris Perdata yang diatur dalam KUHPPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII. Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPPerdata, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPPerdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPPerdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPPerdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.

Pengertian hukum waris adat menurut R. Soepomo adalah Hukum Waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian/pengoperan harta kekayaan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keseleraan dan kedamaian didalam hidup.

Waris dalam perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, yaitu setelah dikurangi dengan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Istilah Kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan *compilatie* yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *compilation*. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.

Berbicara mengenai Hukum Waris tidak terlepas dari proses pembagian waris terutama pembagian waris untuk anak luar kawin. Pelaksanaan dan ketentuan pembagian waris menurut KUHP, Kompilasi Hukum Islam, dan Adat memiliki perbedaan dan ketentuan masing-masing.

Seperti yang telah dijelaskan permasalahan mengenai pembagian waris anak luar kawin masih sering terjadi salah satunya yaitu kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015 dimana pembagian waris anak luar kawin tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik

menyusun penelitian dengan rumusan masalah :

1. Bagimanakah implementasi ketentuan dan pelaksanaan pembagian waris anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung No 3258 K/Pdt/2015 ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai implementasi pelaksanaan dan ketentuan pembagian waris luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015.

II. LANDASAN TEORI

Berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok, yakni:

1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya, dan;
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan, penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.

Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Hukum waris adat adalah peraturan-Struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :

- a) Sistem Kekerabatan Parental
Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).
- b) Sistem Kekerabatan Patrilineal Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

- c) Sistem Keperabatan Matrilineal Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.

Hukum kewarisan menurut BW, mengenal tiga asas lain, yaitu :

- a. Asas individual
Dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 832 jo. 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.
- b. Asas Bilateral
Artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara wanitanya.
- c. Asas Penderajatan
Artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan, diadakan penggolongan penggolongan ahli waris.

Dalam Proses Pembagian Waris setiap Hukum memiliki perbedaan ketentuan baik menurut KUHPerduta, Adat, Islam.

III. HASIL PENELITIAN

A. Analisis terhadap pembagian anak luar kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia di hubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/PDT/2015

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam

kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 : jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1.

Pasal 250 KUHPerduta, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perduta sebagai tempat pengakuan anak luar kawin yaitu

1. Pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut.
2. Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.
3. Sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUHPerduta (Buku I).

Dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerduta tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perduta tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. demikian ketentuan yang dimuat dalam pasal 272.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/Pdt/2015

Dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menerima alasan-alasan kasasi selain mengenai perhitungan

pembagian harta waris. Dengan kata lain, Majelis Hakim telah setuju dengan semua alasan lainnya tersebut. Alasan-alasan tersebut diawali dengan alasan para penggugat dimana para penggugat menginginkan hak-haknya sebagai anak dari ahli waris kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, alasan tersebut dapat diterima, namun tidak dibenarkan seluruhnya. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menurut pendapat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi boedel waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat; Bahwa tanah sengketa adalah milik Ida Nyoman Bagus (orang tua Para Tergugat) yang berasal dari warisan orang tuanya (almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan almarhumah Ida Ayu Putu Rupi);

Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris bersama dengan orang tua Para Tergugat (Ida Nyoman Bagus) telah mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian waris secara sukarela dan kekeluargaan yang diikuti dengan penguasaan dan persertifikatan, sehingga pembagian waris telah selesai;

Bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari almarhum Ida Nyoman Rai Tegeg dan Ida Ayu Putu Rupi tidak berhak lagi menuntut warisan yang sudah dibagi waris semasa orang tua dan pamannya masih hidup;

Bahwa objek sengketa adalah bagian waris yang menjadi hak Ida Nyoman Bagus (paman Para Penggugat) dan sekaligus orang tua Para Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS ERJANA, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

IV. KESIMPULAN

1. Menurut KUHPerdata menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sedangkan menurut hukum Islam Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut hukum adat, memberikan tempat yang khusus bagi anak luar kawin, yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua : (1) anak luar kawin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (2) anak luar kawin dalam beberapa lingkungan hukum ber-ibu perempuan tak berkawin yang melahirkannya, sebagaimana seorang anak terlahir dalam perkawinan ber-ibu si-perempuan yang melahirkan dia

2. Pertimbangan bahwa harta yang sepantasnya diwarisi oleh Para Penggugat adalah yang didapat dari orang tua masing-masing, karena orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat telah membagi *boedel* waris secara adil dan sah, dan dengan meninggalnya orangtua Para Tergugat maka sudah tepatlah Para Tergugat yang mewarisi harta orang tuanya, bukan Para Penggugat.

V. SARAN

Sebaiknya ada penyeragaman pendapat dalam memutuskan perkara waris bagi anak luar kawin dari perkawinan yang dilakukan sebelum UUP berlaku. Hal ini ditunjukkan agar tidak terjadi kebingungan publik karena adanya perbedaan penafsiran, terlebih ketika penafsiran yang dilakukan merupakan penafsiran yang dilakukan merupakan penafsiran yang keliru. Penyeragaman ini dapat memuat pedoman bagi para hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil para pihak sehingga putusan yang dikeluarkann seluruh pengadilan adalah seragam, tidak ada yang berlainan satu sama lain.

Dalam hal terjadi sengketa mengenai pewarisan, adalah lebih baik apabila para pihak yang berseteru melakukan penyelesaian berdasarkan pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Hal ini dilakukan karena para pihak dalam perkara pewarisan tak lain ialah orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain yang oleh karenanya adalah upaya yang sangat baik apabila hasilnya dapat mendamaikan perseteruan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992
- [2] Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- [3] Anisitus Amanat, CN.Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta;PT Raja Gratindo Persada,2003
- [4] Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perapektif Islam,Adat,BW, PT Refika Aditama, Bandung 2018

- [5] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- [6] Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undangundang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- [7] J. Andy Hartanto, Hukum Waris kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, LaksBang, 2015
- [8] Mohammad Yasir Fauzi, Legilasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Hukum
- [9] Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta, 1993
- [10] Van Dijk, R, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006